

JATUHNYA KOTA YOGYAKARTA

Oleh : Suratmin

Kemerdekaan seperti sebuah jembatan. Dengan kemerdekaan, suatu bangsa akan bebas bergerak dalam segala aspek kehidupan. Di seberang jembatan itu dijanjikan suatu kehidupan yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan keagamaan yang leluasa, hidup kemanusiaan secara manusia dan selayak manusia. Untuk tujuan yang mulia itu maka kemerdekaan perlu diupayakan. Kemerdekaan bangsa Indonesia telah dirintis sejak awal abad ke-20. Cita-cita itu terwujud pada 17 Agustus 1945. Pada saat Soekarno - Hatta mewakili seluruh bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dalam waktu yang relatif singkat telah pula terbentuk suatu negara lengkap dengan persyaratannya. Lebih dari itu mempunyai pula Undang-Undang Dasar dan telah mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Walau keadaan belum sempurna telah pula dibentuk kabinet I. Dalam salah satu bagian Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.

Pernyataan itu mencerminkan kesungguhan Indonesia dalam bernegara serta usahanya mengenyahkan penjajah. Sehingga ketika Belanda berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia, mendapat tantangan dari bangsa Indonesia.

Belanda ingin berkuasa kembali di Indonesia serta tidak mau mengakui keberadaan Negara Republik Indonesia, karena menurut anggapannya, Indonesia merdeka hanyalah rekaan Jepang. Sebenarnya segala persiapan untuk mendirikan suatu Republik buatan Jepang telah kandas ketika Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga kapituasi Jepang lebih cepat datangnya dari pada hari kemerdekaan yang dijanjikan Jepang kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian tuduhan Belanda bahwa Indonesia merdeka hanya rekaan Jepang sebenarnya merupakan dalih Belanda untuk membenarkan tindakan yang melanggar hak-hak bangsa lain. Faktor lain yang mendorong Belanda menggebu ingin berkuasa kembali di Indonesia adalah persetujuan Potsdam (sekarang masuk dalam Jerman Timur). Dalam persetujuan Potsdam oleh sekutu, Jepang disarankan agar menyatakan penyerahan dengan tidak bersyarat. Selain itu dalam persetujuan Belanda juga diputuskan bahwa seluruh wilayah kekuasaan Jepang dipulihkan statusnya seperti sebelum perang. Berhubung Indonesia sebelum menjadi wilayah jajahan Jepang merupakan daerah jajahan Belanda, maka ketika Jepang kalah perang, Belanda merasa berhak berkuasa kembali atas Indonesia.

Bangsa Indonesia yang telah merasa merdeka tidak mau menerima kedatangan pemerintah Belanda. Pertempuran-pertempuran berkobar ketika tentara Serikat (Inggris-Gurkha) mendarat di Jawa, sebab di belakangnya “dibonceng” anggota tentara dan pemerintahan Hindia Belanda yang bernama NICA (*Netherlands Indie Civil Administration*). Pada bulan Oktober, November, dan Desember 1945, Jakarta menjadi ajang

kekerasan. Sementara itu Belanda menuntut agar kekuasaannya diakui. Pemerintah Republik Indonesia yang telah lengkap dengan aparatnya supaya diganti dengan suatu pemerintahan yang dikepalai oleh seorang gubernur jenderal dibantu oleh orang-orang Indonesia sebagai menteri dan oleh suatu parlemen Indonesia. Sementara itu pihak Indonesia dalam manifes politik yang dikeluarkan pada bulan November 1945, sanggup mengadakan kerjasama dengan Belanda dalam segala bidang dengan syarat bahwa Belanda harus mengakui kemerdekaan Indonesia. Republik sebagai badan politik yang merdeka akan memberikan prioritas pada bangsa Belanda mengenai ekonomi dan hak-hak modal asing akan diakui sepenuhnya. Oleh karena kedua belah pihak saling mempertahankan prinsip serta konsepsi masing-masing, maka perselisihan tidak dapat dihindarkan. Dalam keadaan demikian Jakarta dirasakan semakin gawat, sehingga dalam sidang kabinet 3 Januari 1946 diambil suatu keputusan untuk memindahkan kedudukan pemerintahan pusat Republik Indonesia ke Yogyakarta.

Guna mencegah konflik tidak menjadi berkepanjangan, untuk pertama kali kontrak antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda lewat perantara duta dari Inggris Sir Archibald Clark Kerr, dicapai suatu kesepakatan semacam rencana perundingan. Rencana itu pada bulan April 1946 dibawa ke Belanda oleh Dr. Hubertus Van Mook dan delegasi Belanda.

Perutusan Indonesia terdiri atas Dr. Sudarmono, Mr. Suwandi, dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Usaha langkah pertama ini memenuhi kegagalan. Kemudian perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda dirintis kembali dan dimulai kembali di Jakarta dengan memakai seorang duta dari Inggris, Lord Killern, sebagai perantara. Hasil perundingan yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir melahirkan naskah Perjanjian Linggarjati (15 November 1946) yang dikuatkan dengan tanda tangan Sutan Sjahrir, A.K. Gani, Susanto Tirtoprodjo, dan Muhammad Roem di pihak Republik Indonesia dan Schermerhorn, Max Van Poll, de Boer, dan anggota *Commissie Generaal* yang dikirim dari Negeri Belanda. Perjanjian Linggarjati tidak membawa perbaikan hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Sesudah naskah ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada 25 Maret 1947, Belanda justru melakukan Agresi Militer I pada 21 Juli 1947. Akibat dari ofensif Belanda yang berlangsung hingga 17 Januari 1948 itu menyebabkan Republik Indonesia kehilangan sebagian daerah kekuasaan yang *de facto* diakui dalam Perjanjian Linggarjati.

Bagi Belanda, daerah-daerah yang direbutnya itu sangat menguntungkan baik dari segi politik maupun ekonomi. Tempat-tempat itu meliputi daerah sekitar Palembang, sekitar Padang, Jawa Barat, Semarang, Surabaya, dan Jawa Timur bagian timur. Dengan aksi militer ini dasar semangat kerjasama yaitu kepercayaan terhadap kejujuran Belanda menjadi hilang. Gelombang kebencian dan kecurigaan meliputi seluruh negeri.

Tindakan Belanda yang nekad itu mengundang campur tangan dunia internasional, dalam hal ini adalah Dewan Keamanan PBB. Dalam resolusinya tertanggal 1, 4, dan 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menghentikan tembak-menembak dengan segera dan bekerja bersama untuk memelihara perdamaian dan ketertiban di Indonesia. Atas tekanan-tekanan Amerika, Republik Indonesia

terpaksa memutuskan untuk menerima prinsip-prinsip Renville dan persetujuan gencatan senjata pada 17 Januari 1948. Ini berarti bahwa daerah Republik Indonesia menjadi lebih sempit karena Jawa tinggal separuh dan Sumatera tinggal seperlima.

Pemerintah Belanda, baik yang ada di Den Haag maupun di Jakarta secara sepihak memutuskan perundingan dengan republik dan selekasnya akan membentuk suatu pemerintahan intern tidak dengan Indonesia. Hal ini mengakibatkan suasana menjadi genting. Keadaan demikian diakui pula oleh para politisi Republik Indonesia, bahkan secara terus terang dijelaskan oleh panglima tertinggi dan panglima tentara dalam order hariannya pada tanggal 16 Desember 1948 malam hari. Walaupun suasana genting sudah disadari, politik, dan ekonomi untuk menghadapi bila terjadi peperangan. Sementara itu Komisi Tiga Negara (KTN) lewat juru bicara Lindsay mengatakan bahwa KTN makin berhasrat penuh untuk menyelesaikan kewajiban dalam pertikaian Indonesia-Belanda. Di samping itu dasar-dasar Persetujuan Renville bersama gencatan senjata masih berlaku, sebab dari pihak Belanda maupun Indonesia tidak ada pernyataan tentang pembatalan persetujuan.

Merasa dirinya telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu seluruh Indonesia Timur dan Kalimantan serta bagian-bagian yang secara ekonomis paling maju di Sumatera dan Jawa serta daerah-daerah yang telah dikuasainya itu Belanda telah mensponsori dirinya negara-negara bagian yang menurut harapannya akan mendukung dalam memberikan pukulan terakhir yang menentukan kepada Republik Indonesia, tetapi yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang hendak dicapai Belanda dengan agresinya yang dimulai pada tanggal 19 Desember 1948. Walaupun ibukota berhasil diduduki dan presiden, wakil presiden, serta sejumlah menteri ditawan, namun ini tidak berarti bahwa keberadaan Negara Republik Indonesia telah lenyap. Sebelum tertangkap para pimpinan negara yang tertawan itu sempat menyelenggarakan sidang. Dalam persidangan itu diambil suatu keputusan bahwa kekuasaan pemerintah Republik Indonesia akan dialihkan kepada Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang akan dipimpin oleh Mr. Sjariffudin Prawiranegara dan berkedudukan di Sumatera. Keputusan lain adalah wakil presiden/perdana menteri mengeluarkan perintah harian supaya angkatan perang dan rakyat terus berjuang apapun yang terjadi dengan para pimpinan negara.

Sementara para pimpinan negara membiarkan diri mereka ditangkap musuh dengan pertimbangan agar selalu dekat dengan Komisi Tiga Negara (KTN), sehingga diharapkan agar segera mengakhiri perselisihan dengan cara diplomasi/perundingan, Jenderal Sudirman bersama anak buahnya meninggalkan kota guna melakukan perang gerilya, walaupun Presiden Soekarno pada waktu itu tidak memperkenalkannya karena ia dalam keadaan sakit parah.

Bersamaan dengan tertawannya para pimpinan negara dan perginya Jenderal Sudirman dari kota ke daerah pedesaan, keadaan tentara tercerai-berai. Mereka bertebaran di berbagai daerah di luar kota sehingga dilakukan konsolidasi terhadap tentara yang berserakan itu. Maksud dari langkah itu adalah untuk mengumpulkan pasukan-pasukan yang tersebar dan menempatkan mereka di tempat yang baik untuk mengadakan perlawanan secara bergerilya. Perjalanan untuk melakukan konsolidasi dimulai dari sebelah selatan kota menuju ke barat,

terus ke utara dan ke timur hingga ke selatan. Dengan bantuan kurir yang telah dikirim terlebih dahulu, maka tidak begitu sukar mencari pimpinan pasukan yang berada di tiap-tiap penjuru. Pada umumnya pasukan yang telah keluar dari kota semuanya berpangkalan di tepi kota. Dengan usaha itu maka daerah perlawanan terbagi dalam beberapa sektor, yaitu : sektor selatan, sektor tenggara, sektor barat, sektor utara, dan sektor timur. Tiap-tiap sektor memiliki batas yang telah ditentukan dan ditunjuk pula pimpinannya dengan diberi tugas antara lain : mengumpulkan kesatuan-kesatuan yang terpencar di daerah sektornya dan memegang pimpinan terhadapnya, mengadakan perlawanan atau serangan secara gerilya terhadap pos-pos Belanda, dan mempersiapkan diri untuk mengadakan serangan balasan.

Sumber : Suratmin, dkk., *Peranan Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan : Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1945-1949*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional : 1992.